



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 69/051/HK/2022

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun lalu
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan
- Bab V. Penutup
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Juli 2022
BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR/051/HK/2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.	6
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	44
Tabel 4.2	Rekap Rencana Pendanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023	54

DAFTAR ISI

Halaman

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 69 /051/HK/2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023.**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan.....	21
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.....	32
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	33
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan.....	33
3.2. Sasaran Renja Dinas Kesehatan.....	34
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN	35
BAB V. PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Kesehatan juga merupakan bagian dari pembangunan daerah sebagai hak asasi manusia yang secara tegas di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di dunia Internasional, konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) tahun 1948 juga menyatakan bahwa *Health is a fundamental right*, yang mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan mempertahankan serta meningkatkan yang sehat. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia dan sehat sebagai investasi.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak terdapat visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- royong". Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah lain yang terkait dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan, serta forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- o. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
- p. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

- a. Mendukung pencapaian rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan.
- b. Mewujudkan pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan melalui program kegiatan yang sesuai

1.4 Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu

- 2.1 Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

3.1. Tujuan Renja Dinas Kesehatan

3.2. Sasaran Renja Dinas Kesehatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu dan capaian Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

Berdasarkan capaian atas berbagai program dan kegiatan selama kurun waktu 2016 –2021 sebagaimana telah dijabarkan di atas, bila dikaitkan dengan target kinerja pada akhir periode, maka capaian target dan realisasi dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan II TAHUN 2022

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Indikator kinerja yang disusun dalam Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, memperhatikan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan, isu-isu global, nasional, regional serta adanya kearifan lokal untuk mendukung percepatan pembangunan kesehatan. Indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 2.2.1 berikut:

Tabel 2.2.1.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2022-2026

Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	80,40 (A)	83,40 (A)	84,00 (A)	85,00 (A)	85,20 (A)	85,20 (A)	82,40 (A)
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	40,00 Dokumen
Jumlah kegiatan Konsultasi dan asistensi program dan kegiatan Prioritas Kesehatan	3 Kali	3 Kali	3,00 Kali	3,00 Kali	3,00 Kali	3,00 Kali	3,00 Kali
Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	0	0	2 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
Jumlah Dokumen DPA SKPD	0	0	2 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	0	0	2 Kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinkes yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen

Logistik Kantor							
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan						
Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan/Surat Kabar	1 tahun						
Terselenggaranya Kegiatan Rapat dan Koordinasi	3 kali						
Tersedianya pengarsipan yang sesuai standar	0	0	12 bulan				
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Tersedianya Peralatan Kantor Sesuai Standar	2 bulan	2 bulan	-	-	2 bulan	2 bulan	2 bulan
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan						
Tersedia Alat Tulis Kantor dan Materai	12 bulan						
Tersedia layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan						
Terciptanya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan Lingkungan Kerja Kantor	12 bulan						
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %						
Jumlah Kendaraan dinas dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan						
Tertibnya Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	314 unit						
Jumlah Perlengkapan dan peralatan Kantor dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan						
Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan						
persentase sarana prasarana gedung	0	0	0	2 paket	0	2 paket	2 paket

kantor yang sesuai standar							
Indeks Kepuasan Masyarakat		84,5%	85,5%	86,5%	87,5%	88,5%	88,5%
Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	0,00	0,00	100 %				
Persentase layanan BLUD puskesmas	0%	0%	100 %				
Tersedianya tata kelola BLUD	0	0	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tersedia dan terpeliharanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Terpenuhinya bangunan puskesmas / puskesmas pembantu yang sesuai standar	0	0	2 pustu				
Terpenuhinya bangunan puskesmas / puskesmas pembantu yang sesuai standar	0	0	2 pustu pustu				
Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu yang sesuai standar	0	13 pusk	13 pusk	13 pusk	13 pusk	13 pusk	2 pustu
Terpenuhinya Alat Kesehatan Untuk Puskesmas	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Terpeliharanya dan Terkalibrasinya Alat Kesehatan di Pustu	54 Pustu	54 Pustu	54 Pustu	54 Pustu	54 Pustu	54 Pustu	54 Pustu
Terlaksananya Obat - Obatan dan Vaksin Pelayanan Kesehatan	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk
Dasar di Puskesmas Terpenuhinya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Terpeliharanya IPAL dan Tersedianya Tempat Sampah Medis	14 Unit IPAL	14 Unit IPAL	14 Unit IPAL	14 Unit IPAL	14 Unit IPAL	14 Unit IPAL	14 Unit IPAL
Terpenuhinya Persediaan Obat Puskesmas Puskesmas dan Jaringannya	0	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk
Terpenuhinya Persediaan Obat Puskesmas dan Jaringannya							

standar							
Terlaksananya Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas Se-Kab.Badung	0%	0	0	0	0	0	0
Terlaksananya pelayanan kesehatan Gizi pada masyarakat	13 Pusk						
jumlah pelayanan yang dilaksanakan pembinaan	0	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk
Terlaksananya layanan kesehatan lingkungan	0 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk
Terlaksananya pelayanan promosi kesehatan	0	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk
Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Yankestrad (asman)	13 Pusk						
Jumlah laporan Sinyal Kewaspadaan Dini Mingguan Yang Direspon	0	52 minggu	52 minggu	52 minggu	52 minggu	52 minggu	52 minggu
Terlaksana pelayanan pd Gangguan Mental Emosional (GME) pada penduduk ≥ 15 tahun sesuai standar	0	0	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk
Jumlah Orang yang Dilakukan Skrining Gangguan Jiwa	13 Pusk						
jumlah Desa/kelurahan Mencapai Universal Child Immunization (UCI)	62 desa/kel						
Seluruh masyarakat Desa/Kelurahan terlayani Mobil Ambulance	62 desa/kel						
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar	13 Pusk						
Terjaminnya Kesehatan Bagi Seluruh Krama di Kabupaten Badung	490.593,00 Jiwa	505.310,79 Jiwa	520.470,11 Jiwa	530.879,52 Jiwa	546.805,90 Jiwa	563.210,08 Jiwa	573924,421 Jiwa
Jumlah Fasyankes/ sekolah yang melaksnakan skrening NAPZA pada anak SMA/SMK	13 Pusk	0	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk	13 Pusk
		80%	80%	80%	80%	80%	13

antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
Tercapainya Hiegiene Sanitasi Makanan pada TPM, Jasa Boga dan Depot Air Minum	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI
Jumlah stiker pembinaan yang diterbitkan	0	0	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI
Tersedianya tempat penjualan makanan jajanan dan sentra makan jajanan yg terkendali dan diawasi serta ditindaklanjuti dg stiker	0	0	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI
Persentase P-IRT yang memenuhi standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah post market yang diawasi dan sesuai dengan standar	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI	65 LOKASI
Tersedianya data industri RT yang update dan valid	0	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prosentase Pelayanan Kesehatan Dasar di Posyandu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya kegiatan promosi Kesehatan , advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	13 pusk	13 pusk	13 pusk	13 pusk	13 pusk	13 pusk	13 pusk
Terlaksananya kegiatan promotif preventif yang terinteraktif	0	0	1 Kali	1 Kali	2 kali	2 kali	2 kali
Jumlah kegiatan promotif preventif yang dilaksanakan secara integrasi	0	0	1 kali	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali
Terbentuknya UKBM baru yang inovatif dan berdaya saing	0	0	13 lokasi				
Jumlah UKBM yang mendapat bimbingan teknis dan supervisi	0	0	13 lokasi				

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Berikut adalah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesehatan :

- 1) Mempercepat status kesehatan masyarakat (upaya-upaya kesehatan sesuai tahapan kehidupan (*life cycle*) secara berkesinambungan
- 2) Peningkatan status gizi masyarakat
- 3) Percepatan pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan
- 4) Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan
- 5) optimalisasi kemandirian dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Penguatan implementasi Sistem Kesehatan Nasional untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya
- 7) Peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dengan penekanan pada layanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas
- 8) Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
- 9) Penguatan manajemen dan sistem informasi
- 10) Peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Renja Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indiatof, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabana serta pelaporan kinerja keuangan.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Tujuan strategis perangkat daerah disusun untuk menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian tindakan atau program yang akan dirancang. Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rencana strategi (Renstra) tahun 2021-2016 tujuan rencana kerja Dinas Kesehatan yang ditetapkan yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, yang mana keberhasilan pencapaian tujuan diukur dalam kurun waktu lima tahunan. Guna mencapai tujuan renja Dinas Kesehatan.

3.2. Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Sasaran perangkat daerah merupakan subjek dan objek perubahan yang akan diintervensi melalui berbagai tindakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Sasaran lebih difokuskan pada pelaku dan pemanfaat sebagai pengaruh dari pelayanan perangkat daerah. Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan implementasi dari rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, untuk satu tahun anggaran. Tahun anggaran 2023 sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna
3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat
5. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Penyusunan tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah didasarkan kepada analisis kinerja pelayanan tahun lalu dan isu-isu strategis yang Keberhasilan pencapaian Sasaran diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator sasaran yang disesuaikan Rencana Strategis 2021-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

4.1. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2021-2026. Adapun rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung melaksanakan 5 (lima) Program Prioritas, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan Kegiatan) , RSUD Mangusada melaksanakan rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya meliputi 2 (dua) Program, 5 (kegiatan) dan 8 (delapan) Sub Kegiatan, sedangkan Puskesmas hanya melaksanakan 1 (satu) Program, 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan.

Adapun sumber dana dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung dan dana Transfer Pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , DBH/CAT, DID, DBH, BKK sedangkan Operasional Pelayanan Rumah Sakit bersumber dari Pendapatan Rumah Sakit dan Operasional Pelayanan Puskesmas Bersumber dari Pendapatan Puskesmas. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. DINAS KESEHATAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan :

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan :

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a). Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

Kegiatan :

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan :

2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan :

- a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- b) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- c) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d) Pengadaan Obat, Vaksin
- e) Pengadaan Bahan Habis Pakai
- f) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- g) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- h) Distribusi alat Kesehatan obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman Ke Puskesmas Serta fasilitas Kesehatan lainnya.

Kegiatan :

2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
- m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- q) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- r) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- s) Pengelolaan Surveilans
- t) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- u) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- v) Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan dan Pascakrisis Kesehatan
- w) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- x) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- y) Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah
- z) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- aa) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- bb) Pengelolaan Penelitian Kesehatan
- cc) Operasional Pelayanan Puskesmas
- dd) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- ee) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Kegiatan :

2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub kegiatan :

- a) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Kegiatan :

2.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

Sub kegiatan :

- a) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kegiatan :

3.1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a) Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Kegiatan :

3.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

Kegiatan :

3.4 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Kegiatan :

4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub kegiatan :

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b) Penyediaan dan Pengelolaan data Perizinan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)

Kegiatan :

4.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sub kegiatan :

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi

Kegiatan :

4.3 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Sub kegiatan :

- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Kegiatan :

4.4 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan sentra makanan jajanan

Sub kegiatan :

- a) Tindak lanjut pemerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan

Kegiatan :

4.5 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Post market pada Produksi dan Produk makanan minuman industri Rumah Tangga

Sub kegiatan :

- a) Pemeriksaan Post market pada Produksi dan Produk makanan minuman industri Rumah Tanggaserta tindak lanjut pengawasan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Kegiatan :

5.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan :

- a) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan :

5.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif , Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat

Kegiatan :

5.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

II RSUD MANGUSADA

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan :

1.1 Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan :

1.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan :

1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan :

2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a) Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- c) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kegiatan :

2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a) Operasional Pelayanan Rumah Sakit

III PUSKESMAS

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan :

1.1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

Sub kegiatan :

- a)Operasional Pelayanan Puskesmas

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2024	
		keluaran sub Kegiatan						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
		Tolak Ukur	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumbare dana		Target Capaian Kinerja	Indikatif
1	2	3		8	9		8	11	
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								460.052.725.808,13
02	URUSAN KESEHATAN								460.052.725.808,13
01	DINAS KESEHATAN								442.248.755.709,93
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		100 %	156.755.712.543,00			100 %	196.657.855.538,00
2.01	KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan		84,00 (A)	22.536.589,00			84,00 (A)	29.312.586,00
01	SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	8,00 Dokumen	14.316.764,00	APBD	kegiatan rutin	8,00 Dokumen	19.551.752,00
07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	8,00 Laporan	8.219.825	APBD	kegiatan rutin	4,00 Dokumen	9.760.834,00
2.02	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tercapainya pelaksanaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Kesehatan	100 %	141.207.483.535	APBD	kegiatan rutin	100 %	181.470.235.907,00
01	SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	750 Orang	141.207.483.535	APBD	kegiatan rutin	750 Orang	181.470.235.907,00
2.05	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Dinas Kesehatan	100 %	14.782.800	APBD	kegiatan rutin	100 %	26.400.000,00
03	SUB KEGIATAN : PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	14.782.800	APBD	kegiatan rutin	12 Dokumen	26.400.000,00
2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tercapainya pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Kesehatan	100 %	2.271.619.205	APBD	kegiatan rutin	100 %	2.500.701.159,00
01	SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Kesehatan	1 paket	11.538.450	APBD	kegiatan rutin	1 paket	16.496.392,00
04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Kesehatan	17 paket	2.116.134.500	APBD	kegiatan rutin	7 paket	2.327.747.950,00
05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Kesehatan	1,00 paket	36.786.255	APBD	kegiatan rutin	1,00 paket	38.580.817,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2024		
		keluaran sub Kegiatan						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	
		Tolak Ukur	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumbare dana		Target Capaian Kinerja	Indikatif	
1	2	3		8	9		8	11		
	06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dinas Kesehatan	8,00 dokumen	107.160.000,00	APBD	kegiatan rutin	8,00 dokumen	117.876.000,00
		KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				62.932.065				216.464.600,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Paeralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Kesehatan	1,00 Paket	62.932.065	APBD	kegiatan rutin	1,00 Paket	216.464.600,00
	2.08	KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDERAH	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	12 bulan	7.267.694.207	APBD	kegiatan rutin	12 bulan	6.917.672.903,00
		SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURATMENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Dinas Kesehatan	12,00 laporan	34.475.223,00	APBD	kegiatan rutin	12,00 laporan	34.567.756,00
		02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Kesehatan	12,00 laporan	2.203.381.424,00	APBD	kegiatan rutin	12,00 laporan	243.719.567,00
		04 PENYEDIAAN JASAPELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	Dinas Kesehatan	12,00 laporan	5.029.837.560,00	APBD	kegiatan rutin	12,00 laporan	6.639.385.580,00
	2.09	KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	100 %	5.908.664.142	APBD	kegiatan rutin	100 %	5.497.068.383,00
		SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Kesehatan	1 unit	40.849.500	APBD	kegiatan rutin	1 unit	50.215.611
		02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Dinas Kesehatan	314 unit	5.200.087.858	APBD	kegiatan rutin	314 unit	4.696.453.396
		06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Perlengkapan dan peralatan Kantor dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Dinas Kesehatan	13 Unit	549.036.784	APBD	kegiatan rutin	13 Unit	489.263.505,00
		09 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara yang dipelihara/ Direhabilitasi	Dinas Kesehatan	77 unit	118.690.000	APBD	kegiatan rutin	77 unit	261.135.871
	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	Dinas Kesehatan	100 %	186.909.693.098,00	APBD	kegiatan rutin	100 %	242.197.762.537,13

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2024	
		keluaran sub Kegiatan						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
		Tolak Ukur	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumbare dana		Target Capaian Kinerja	Indikatif
1	2	3		8	9		8	11	
2.01	KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedia dan terpeliharanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1 paket	14.048.817.081,00	APBD	kegiatan rutin	1 paket	14.292.987.161,00
	09 SUB KEGIATAN : REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan dipelihara oleh Puskesmas	Dinas Kesehatan	3 Unit	330.320.627	APBD	kegiatan rutin	3 Unit	307.456.841,00
	14 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	Dinas Kesehatan	185 Unit	1.499.154.032	APBD	kegiatan rutin	185 Unit	1.698.195.941
	16 PENGADAAN OBAT, VAKSIN	Jumlah Obat - Obatan dan Vaksin yang disediakan	Dinas Kesehatan	1 Paket	3.466.882.659	APBD	kegiatan rutin	1 Paket	3.880.681.246,00
	17 PENGADAAN BAHAN HABISPAKAI	Jumlah Bahan Habis Pakai Medis yang disediakan	Dinas Kesehatan	39 paket	7.502.212.099	APBD	kegiatan rutin	39 paket	8.252.544.971,00
	19 PEMELIHARAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Dinas Kesehatan	11 unit	139.944.767	APBD	kegiatan rutin	11 unit	154.108.162
	20 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terpelihara sesuai dengan standar	Dinas Kesehatan	1383 Unit	972.300.317	APBD	kegiatan rutin	1383 Unit	1.069.563.490
	21 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, VAKSIN, BMHP, MAKANAN DAN MINUMAN KE PUSKESMAS SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	Jumlah Distribusi alat Kesehatan,Obat Vaksin, BMHP dan Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	168 paket	138.002.580	APBD	kegiatan rutin	168 paket	112.874.388,00
2.02	KEGIATAN : PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DANUKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	100 %	171.901.124.618	APBD	kegiatan rutin	100 %	226.212.406.351,13
	01 SUB KEGIATAN : PENGELOLAAN PELAYANANKESHEHATAN IBU HAMIL	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	11040 orang	651.723.672	APBD	kegiatan rutin	11040 orang	826.224.057
	02 PENGELOLAAN PELAYANANKESHEHATAN IBU BERSALIN	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	10538 orang	361.929.460	APBD	kegiatan rutin	10538 orang	428.741.710
	03 PENGELOLAAN PELAYANANKESHEHATAN BAYI BARU LAHIR	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	10036 orang	632.464.057	APBD	kegiatan rutin	10036 orang	742.164.879
	04 PENGELOLAAN PELAYANANKESHEHATAN BALITA	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	33048 Orang	578.521.975	APBD	kegiatan rutin	33048 Orang	659.823.381

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2024		
		keluaran sub Kegiatan						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	
		Tolak Ukur	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumbare dana		Target Capaian Kinerja	Indikatif	
1	2	3		8	9		8	11		
	05	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	71848 orang	389.991.453	APBD	kegiatan rutin	71848 orang	42.990.598
	06	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	330317 orang	1.272.842.805	APBD	kegiatan rutin	330317 orang	1.689,125724
	07	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	34467 orang	207.534.216	APBD	kegiatan rutin	34898 orang	228.267.638
	08	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Jumlah Penderita Hypertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	8054 orang	290.478.600	APBD	kegiatan rutin	8054 orang	342.019.780
	09	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	3029 orang	156.478.600	APBD	kegiatan rutin	3029 orang	194.619.780
	10	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	Jumlah Orang yang mengalami Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	624 orang	240.850.000	APBD	kegiatan rutin	624 orang	264.935.000
	11	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Jumlah Orang yang terduga menderita Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	564 Orang	979.009.681	APBD	kegiatan rutin	1345543 Orang	1.345.543.689
	12	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	Jumlah Orang yang terduga menderita HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	15138 orang	3.046.125.917	APBD	kegiatan rutin	15138 orang	4.382.697.703
	13	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kasehatan pada penduduk pasca kondisi kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai dg standar	Dinas Kesehatan	12 Dokumen	1.930.565.000	APBD	kegiatan rutin	12 Dokumen	2.123.621.500
	15	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	286 Dokumen	1.626.632.438	APBD	kegiatan rutin	286 Dokumen	2.014.951.337
	16	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	52.860.083	APBD	kegiatan rutin	2 Dokumen	58.146.095
	17	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	299.905.374	APBD	kegiatan rutin	2 Dokumen	329.895.912
	18	PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	5 Dokumen	614.660.038	APBD	kegiatan rutin	5 Dokumen	709.367.767
	19	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur,Asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Dinas Kesehatan	62 Dokumen	69.229.670	APBD	kegiatan rutin	62 Dokumen	105.109.779

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2024			
		keluaran sub Kegiatan						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu		
		Tolak Ukur	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumbare dana		Target Capaian Kinerja	Indikatif		
1	2	3		8	9		8	11			
	2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	279.377.945	APBD	kegiatan rutin	100 %	317.350.971,00
		03	SUB KEGIATAN : PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	13 unit	279.377.945	APBD	kegiatan rutin	13 unit	317.350.971
3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	Dinas Kesehatan	100 %	1.304.599.624	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.479.030.850,00
	2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DIWILAYAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Proses Penerbitan Perizinan	Dinas Kesehatan	100 %	238.291.624	APBD	kegiatan rutin	100 %	303.952.123,00
		01	SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN PERIZINANPRAKTIK TENAGA KESEHATAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	2300 Dokumen	238.291.624	APBD	kegiatan rutin	2300 Dokumen	303.952.123,00
	2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	Terlengkapinya SDM sesuai standar	Dinas Kesehatan	100 %	1.066.308.000,00	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.175.078.727,00
		02	SUB KEGIATAN : PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Fasyankes	Dinas Kesehatan	20 orang	1.066.308.000,00	APBD	kegiatan rutin	20 orang	1.175.078.727,00
4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan	100 %	326.159.124,00	APBD	kegiatan rutin	100 %	319.848.221,00
	2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	Dinas Kesehatan	100 %	151.094.903,00	APBD	kegiatan rutin	100 %	232.131.852,00
		01	SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Apotek Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	270 Dokumen	66.823.274	APBD	kegiatan rutin	270 Dokumen	102.624.531,00
		02	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DATA PERIZINAN DAN TINDAKLANJUT PENGAWASAN IZIN APOTEK,	Jumlah Apotek , Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Apotek Usaha Mikro	Dinas Kesehatan	270 Sarana	84.271.629	APBD	kegiatan rutin	270 Sarana	129.507.321,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2024			
		keluaran sub Kegiatan						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu		
		Tolak Ukur	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumbare dana		Target Capaian Kinerja	Indikatif		
1	2	3		8	9		8	11			
			TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	Obat Tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut Penerbitan Izin Apotek, toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
	2.03		KEGIATAN : PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	Jumlah PIRT yang bersertifikat	Dinas Kesehatan	70 Dokumen	95.516.322,00	APBD	kegiatan rutin	70 Dokumen	105.067.954,20
		01	SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IJIN PRODUKSI	Jumlah Dokumen Hasil pengendalian serta Tindak lanjut Pengawasan sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah tangga	Dinas Kesehatan	70 Dokumen	95.516.322,00	APBD	kegiatan rutin	70 Dokumen	105.067.954
	2.04		KEGIATAN : PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	Tersedianya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	100 %	30.937.899	APBD	kegiatan rutin	100 %	34.245.369,00
		01	SUB KEGIATAN : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	Jumlah Dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawas an penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	1 Dokumen	30.937.899	APBD	kegiatan rutin	1 Dokumen	34.245.369
	2.06		KEGIATAN : PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	Persentase P-IRT yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan	100 %	48.610.000	APBD	kegiatan rutin	100 %	53.471.000
		01	SUB KEGIATAN : PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	Jumlah Produksi dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	26 unit	48.610.000	APBD	kegiatan rutin	26 unit	53.471.000
5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis	Dinas Kesehatan	100 %	1.529.559.102	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.594.258.563,80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2024	
		keluaran sub Kegiatan						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
		Tolak Ukur	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumbare dana		Target Capaian Kinerja	Indikatif
1	2	3		8	9		8	11	
		Masyarakat)							
2.01	KEGIATAN : ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Kesehatan Dasar di Posyandu	Dinas Kesehatan	100 %	1.143.648.073	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.273.219.760,00
	01 SUB KEGIATAN : PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi, Kemitraan dan Pemembrdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	6 Dokumentasi	1.143.648.073	APBD	kegiatan rutin	8 Dokumentasi	1.273.219.760,00
2.02	KEGIATAN : PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya kegiatan promotif preventif yang terinterगतif	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	291.853.458	APBD	kegiatan rutin	2 Dokumen	321.038.804
	01 SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	291.853.458	APBD	kegiatan rutin	2 Dokumen	321.038.804
	BLUD PUSKESMAS UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I				16.185.427.362				17.803.970.098,20
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	1.495.000.000	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.644.500.000,00
	KEGIATAN ; PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	300 orang	1.495.000.000	APBD	kegiatan rutin	300 orang	1.644.500.000,00
	SUBKEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	100 %	1.495.000.000	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.644.500.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	893.124.517	APBD	kegiatan rutin	100 %	982.436.968,70
	KEGIATAN ; PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	300 orang	893.124.517	APBD	kegiatan rutin	300 orang	982.436.968,70
	SUBKEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	100 %	893.124.517	APBD	kegiatan rutin	100 %	982.436.968,70
	UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Aksesibilitas dan Layanan	Dinas Kesehatan	100	1.008.714.081	APBD	kegiatan rutin	100	1.109.585.489,10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2024	
		keluaran sub Kegiatan						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
		Tolak Ukur	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumbare dana		Target Capaian Kinerja	Indikatif
1	2	3		8	9		8	11	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	1.920.687.562	APBD	kegiatan rutin	100 %	2.112.756.318,20
	KEGIATAN ; PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	300 orang	1.920.687.562	APBD	kegiatan rutin	300 orang	2.112.756.318,20
	SUBKEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	100 %	1.920.687.562	APBD	kegiatan rutin	100 %	2.112.756.318,20
	UPTD. Puskesmas Mengwi I								
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	2.390.663.773	APBD	kegiatan rutin	100 %	2.629.730.150,30
	KEGIATAN ; PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	300 orang	2.390.663.773	APBD	kegiatan rutin	300 orang	2.629.730.150,30
	SUBKEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	100 %	2.390.663.773	APBD	kegiatan rutin	100 %	2.629.730.150,30
	UPTD. Puskesmas Mengwi II								
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	1.343.177.418	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.477.495.159,80
	KEGIATAN ; PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	300 orang	1.343.177.418	APBD	kegiatan rutin	300 orang	1.477.495.159,80
	SUBKEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	100 %	1.343.177.418	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.477.495.159,80
	UPTD. Puskesmas Mengwi III								
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	1.097.972.222	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.207.769.444,20
	KEGIATAN ; PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	300 orang	1.097.972.222	APBD	kegiatan rutin	300 orang	1.207.769.444,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan	Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan maju Tahun 2024	
		keluaran sub Kegiatan						Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu
		Tolak Ukur	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumbare dana		Target Capaian Kinerja	Indikatif
1	2	3		8	9		8	11	
	SUBKEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS UPTD. Puskesmas Petang I	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	100 %	1.097.972.222	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.207.769.444,20
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	798.960.083	APBD	kegiatan rutin	100 %	878.856.091,30
	KEGIATAN ; PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	300 orang	798.960.083	APBD	kegiatan rutin	300 orang	878.856.091,30
	SUBKEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS UPTD. Puskesmas Petang II	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	100 %	798.960.083	APBD	kegiatan rutin	100 %	878.856.091,30
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	839.560.000	APBD	kegiatan rutin	100 %	923.516.000,00
	KEGIATAN ; PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	300 orang	839.560.000	APBD	kegiatan rutin	300 orang	923.516.000,00
	SUBKEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS UPTD. Puskesmas Kuta Utara	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	100 %	839.560.000	APBD	kegiatan rutin	100 %	923.516.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	100 %	1.550.445.536	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.705.490.089,60
	KEGIATAN ; PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual	Dinas Kesehatan	300 orang	1.550.445.536	APBD	kegiatan rutin	300 orang	1.705.490.089,60
	SUBKEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	100 %	1.550.445.536	APBD	kegiatan rutin	100 %	1.705.490.089,60

Tabel 4.2
Rekap Rencana Pendanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	NAMA UNIT	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	Dinkes	346.825.723.491	
2	RSUD Mangusada	306.083.306.526	
3	Puskesmas Petang I	798.960.083	
4	Puskesmas Petang II	839.560.000	
5	Puskesmas Abiansemal I	1.495.000.000	
6	Puskesmas Abiansemal II	893.124.517	
7	Puskesmas Abiansemal III	1.008.714.081	
8	Puskesmas Abiansemal IV	1.027.457.201	
9	Puskesmas Mengwi I	2.390.663.773	
10	Puskesmas Mengwi II	1.343.177.418	
11	Puskesmas Mengwi II	1.097.972.222	
12	Puskesmas Kuta I	1.265.852.688	
13	Puskesmas Kuta II	553.812.281	
14	Puskesmas Kuta Utara	1.550.445.536	
15	Puskesmas Kuta Selatan	1.920.687.562	
	Total Dana	669.094.457.379	

BAB V

PENUTUP

Pembangunan Kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan disusun dengan memperhatikan masukan dari kecamatan dan kinerja pelaksanaan kegiatan Satuan Perangkat Daerah tahun berjalan. Dengan demikian, penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan, merupakan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan Kecamatan dengan Rencana Kerja Dinas Kesehatan.

Mangupura,

PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,



WISNANTO DARTA
PEMBINA TK I
NIP . 19671222 199903 1 006

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA